disbud
KABUPATEN BANDUNG

RENCANA KERJA TAHUN 2026



DINAS KEBUDAYAAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 233 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disbud adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis Disbud yang selanjutnya disebut Renstra Disbud adalah dokumen perencanaan Disbud untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Disbud yang selanjutnya disebut Renja Disbud adalah dokumen perencanaan Disbud untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Disbud yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Disbud, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Disbud adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Disbud untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Disbud Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Disbud Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Disbud Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Disbud untuk melaksanakan rencana kerja Disbud;
(2) Renja Disbud Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Disbud tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Disbud;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Disbud dengan dokumen RKPD dan Renstra Disbud;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Disbud yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Disbud digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja Disbud selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Disbud Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA DISBUD

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Disbud Tahun 2026 disusun dengan sistemika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Disbud tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Disbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA DISBUD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Disbud menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Disbud meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Disbud sesuai dengan tugas dan fungsi Disbud;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Disbud dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Disbud.

Pasal 7

(1) Disbud membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Disbud.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Disbud disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Disbud tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Disbud melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disbud dan evaluasi hasil Renja Disbud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disbud terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Disbud.

(3) Kepala Disbud menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Disbud.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Disbud dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA DISBUD

Pasal 9

(1) Renja Disbud dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Disbud beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Disbud Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Disbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Disbud tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 233

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR ..... TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2026

RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah tahunan. Renja Perangkat Daerah mencerminkan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) dalam periode satu tahun, yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan terukur.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dibentuk sebagai perangkat daerah baru hasil pemisahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pembentukan dinas ini merupakan respon terhadap tuntutan strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan secara lebih spesifik, mendalam, dan berkelanjutan. Dengan mandat tersebut, Dinas Kebudayaan memiliki peran sentral dalam pelestarian warisan budaya, penguatan identitas lokal, pemberdayaan pelaku budaya, serta pengembangan ekosistem budaya yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2026 disusun untuk memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang kebudayaan sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Selain itu, Renja ini juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dan kebijakan teknis lainnya yang relevan, serta memperhatikan prinsip partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman kerja bagi seluruh unit pelaksana teknis dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai daerah yang memiliki ketahanan budaya, kecintaan terhadap nilai-nilai lokal, serta daya hidup kebudayaan yang kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Bandung dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
f. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 83).

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung selama Tahun 2026.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung;
2. Menjabarkan rencana strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2026. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;

3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2026;
4. Menjadi acuan bagi Dinas Kebudayaan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

I.4 Sistematika

Secara garis besar, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, dan keterkaitan antara antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum
Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kebudayaan.

I.3 Maksud dan Tujuan
Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan.

I.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kebudayaan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
Bab ini memuat informasi tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalann yang seharusnya pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan
Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program;
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan menganai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

III.3 Program dan Kegiatan
Berisikan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini di kemukakan rumusan rencana kerja beserta rancangan pendanaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2025

V.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung pada tahun 2025, berbagai dinamika dan perubahan kebijakan, baik dari sisi internal pemerintahan maupun dari pengaruh eksternal, memberikan dampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Perubahan tersebut turut memengaruhi orientasi kebijakan kelembagaan, terutama pasca pemekaran Dinas Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menuntut penyesuaian pada tingkat program, kegiatan, hingga subkegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan urusan kebudayaan;
b. Dasar hukum pembentukan Dinas Kebudayaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c. Penegasan kelembagaan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
d. Prinsip keberlanjutan pembangunan (sustainable development), dengan mempertimbangkan kesinambungan program, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta pengalokasian anggaran secara tepat sasaran.

Evaluasi terhadap capaian Renja dan Renstra tahun sebelumnya menjadi pijakan penting dalam menyusun rencana kerja yang lebih realistis dan responsif terhadap tantangan. Melalui evaluasi tersebut, Dinas Kebudayaan dapat mengidentifikasi program atau kegiatan yang berjalan efektif, maupun yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan, baik dari aspek substansi, koordinasi antar-stakeholder, maupun aspek anggaran. Proses evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat dan keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal.

Selain itu, pemisahan kelembagaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul dari proses adaptasi organisasi baru yang memerlukan penguatan sumber daya manusia, perumusan kebijakan internal, serta pengembangan sistem kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi baru. Namun, di sisi lain, keberadaan Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri menjadi peluang untuk fokus secara lebih mendalam dalam urusan pelestarian, pembinaan, dan pemajuan kebudayaan daerah dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif.

Dengan demikian, penyusunan Renja Tahun 2026 tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari proses transformatif kelembagaan. Dokumen ini menjadi alat strategis dalam menyusun prioritas

pembangunan kebudayaan yang berbasis data, evaluasi, dan aspirasi masyarakat. Ke depan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan budaya yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung

Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025, khususnya dalam bidang kebudayaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2025

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 [4 + 6 + 8]		10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai LAKIP DISBUDPAR 2. Persentase aset dalam kondisi baik	78 poin 89%	69.153.474.3	75,55 Poin 92,55%	9.582.872.56	74 poin 92,55%	16.188.981.0	75,55 poin 92,25%	14.010.340.56		86,54	76 poin 89%	15.941.750.2	0 poin 0%	50.716.633.1 9		73,34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.310.000.00	20%	136.787.95	100%	410.696.00	100%	330.522.00	40%	80,48	100%	194.000.00	40%	792.079.75	40%	60,46
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	450.000.00	2 Dokumen	25.514.40	2 Dokumen	65.000.00	2 Dokumen	41.608.00	50%	64,01	2 Dokumen	130.000.00	5 Dokumen	312.742.20	50%	69,50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	48.000.00	0 dokumen		1 dokumen	2.000.00	1 dokumen	968.00		48,40	1 dokumen	4.000.00	1 dokumen	4.968.00		10,35
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	48.000.00	1 dokumen	1.501.00	1 dokumen	2.000.00	1 dokumen	1.501.00		75,05	1 dokumen	4.000.00	2 dokumen	7.002.00		14,59
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	18.000.00	0 dokumen		1 Dokumen	2.000.00	0 Dokumen	0		0,00	1 dokumen		1 dokumen			0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	18.000.00	1 Dokumen	2.947.55	1 Dokumen	2.000.00	0 Dokumen	0		0,00	1 Dokumen		0 Dokumen	2.947.55		16,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	38.000.00	4 Laporan	43.360.00	0 Laporan	38.000.00	0 Laporan	0		0,00	4 Laporan	6.000.00	0 Laporan	49.360.00		129,89
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	690.000.00	2 Laporan	63.465.00	2 Laporan	299.696.00	2 Laporan	286.445.00	50%	95,58	2 Laporan	50.000.00	1 Laporan	415.060.00	50%	60,15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	41.718.195.0	20%	8.197.013.24	100%	9.295.438.29	100%	8.164.935.25	40%	87,84	100%	10.080.859.7	40%	31.093.453.1 92	40%	74,53
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	40 Orang / Bulan	41.453.195.0	40 Orang / Bulan	8.192.713.24	40 Orang	9.295.438.29	40 Orang	8.162.355.25	100%	87,81	40 Orang	10.076.859.7	38 Orang	31.082.573.1 92	50%	74,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										0,00						#DIV/0!
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										0,00						#DIV/0!
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										0,00						#DIV/0!

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (s/d Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 (4 + 6 + 8)		10	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	15.000.00	1 Laporan	1.720.00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!	1 Laporan	1.000.00	0 Laporan	2.720.00		18,13
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	250.000.00	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!	2 Laporan	3.000.00	0 Laporan	3.000.00		1,20
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Laporan	2.580.00	0 Laporan		0 Laporan	2.580.00		0,00	0 Laporan		0 Laporan	5.160.00		#DIV/0!
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	290.000.00	20%		100%	51.518.00	100%	42.780.00	40%	83,04	100%	31.000.00	40%	90.855.00	40%	31,33
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen	5.000.00	2 dokumen		2 dokumen	1.000.00	2 dokumen		100%	0,00	2 dokumen	1.000.00	0 dokumen	1.000.00		20,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	285.000.00	12 Laporan		12 Laporan	50.518.00	12 Laporan	42.780.00	100%	84,68	12 Laporan	30.000.00	5 Laporan	89.855.00		31,53
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	131.010.00	20%	1.575.00	100%	131.010.00	100%	1.870.00	40%	1,43	100%	14.089.18	40%	22.234.18	40%	16,97
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (ad Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 [4 + 6 + 8]		10	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pegolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 Laporan	131.010.00	24 Laporan	1.575.00	12 Laporan	131.010.00	12 Laporan	1.870.00		1,43	12 Laporan	14.089.18	5 Laporan	22.234.18		16,97
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100.000.00	20%	42.759.20	100%		100%	42.759.20		#DIV/0!	100%	172.500.00	0%	258.018.40		258,02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										0,00						#DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 stel		100 stel	42.759.20	0 stel		0 stel	42.759.20		0,00	0 stel		0 stel	85.518.40		#DIV/0!
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0,00	0 Pegawai		0 Pegawai			#DIV/0!
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0,00	0 Pegawai		0 Pegawai			#DIV/0!
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0,00	0 Pegawai		0 Pegawai			#DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0,00	0 Pegawai		0 Pegawai			#DIV/0!
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	100.000.00	0 Orang		0 Orang		0 Orang			0,00	68 Orang	172.500.00	0 Orang	172.500.00		172,50
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang			0,00	0 Orang		0 Orang			#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.285.000.00	20%	379.259.32	100%	1.118.633.30	100%	947.853.69	40%	84,73	100%	519.511.00	40%	2.094.958.6	40%	91,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.000.00	1 Paket	29.457.20	2 Paket	280.507.90	1 Paket	217.440.19	40%	77,52	1 Paket	50.000.00	0,5 Paket	346.889.29	40%	231,26
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	500.000.00	1 Paket	227.728.00	2 Paket	374.500.00	2 Paket	316.217.34	40%	84,44	1 Paket	100.000.00	1 Paket	660.605.34	40%	132,12

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 (4 + 6 + 8)		10	
	Disediakan																
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.000.00	1 Paket	15.384.39	1 Paket	74.855.40	1 Paket	74.853.30	40%	100,00	1 Paket	61.011.00	0,5 Paket	183.389.59	40%	183,39
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.00	1 Paket	27.879.60	1 Paket	20.000.00	1 Paket	19.967.00	40%	99,84	1 Paket	20.000.00	0,5 Paket	81.087.10	40%	81,09
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	405.000.00	1 Paket	26.830.53	1 Paket	96.000.00	1 Paket	89.467.80	40%	93,20	1 Paket	80.000.00	0,5 Paket	228.965.59	40%	56,53
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	30.000.00	12 Dokumen	5.409.60	12 Dokumen	6.000.00	12 Dokumen	5.950.00	40%	99,17	12 Dokumen	8.500.00	5 Dokumen	21.614.60	40%	72,05
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	250.000.00	1 Paket	4.400.00	1 Paket	91.770.00	1 Paket	72.468.00	40%	78,97	1 Paket	20.000.00	0,5 Paket	112.653.60	40%	45,06
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	250.000.00	12 laporan	8.460.00	12 laporan	50.000.00	12 laporan	37.560.00	40%	75,12	12 laporan	50.000.00	5 laporan	102.580.00	40%	41,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	500.000.00	24 laporan	33.710.00	12 laporan	125.000.00	12 laporan	113.930.00	40%	91,14	12 laporan	130.000.00	5 laporan	357.173.50	40%	71,43
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	550.000.00	20%	411.623.00	100%	109.315.00	100%	203.307.00	100%	185,98	100%	50.000.00	100%	714.430.00	100%	129,90
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	125.000.00	11 Unit	21.200.00	1 Unit	4.700.00	0 Unit	4.700.00		0,00	0 Unit		0 Unit	25.900.00		20,72
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	250.000.00	14 Unit	296.153.00	9 Unit	104.615.00	9 Unit	104.337.00	100%	99,73	9 Unit	50.000.00	9 Unit	499.990.00	100%	200,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 Unit	175.000.00	20 Unit	94.270.00	0 Unit		0 Unit	94.270.00		0,00	0 Unit		0 Unit	188.540.00		107,74
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 (4 + 6 + 8)		10	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.744.269.3	20%		100%	4.595.990.42	100%	3.911.370.10	40%	85,10	100%	4.619.790.34	40%	14.468.848.8	40%	69,75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	3.650.000.00	12 Laporan	346.374.83	12 Laporan	600.000.00	12 Laporan	394.512.75	40%	65,75	12 Laporan	650.000.00	5 Laporan	1.675.035.6	40%	45,89
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	17.094.269.3	12 Laporan	3.381.946.42	12 Laporan	3.995.990.42	12 Laporan	3.516.857.34	40%	88,01	12 Laporan	3.969.790.34	5 Laporan	12.793.813.6	40%	74,84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.125.000.00	20%	456.614.04	100%	476.380.00	100%	407.702.51	40%	85,58	100%	260.000.00	40%	1.181.755.9	40%	55,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	250.000.00	1 Unit	73.713.69	1 Unit	46.530.00	1 Unit	27.718.20	40%	59,57	1 Unit	50.000.00	1 Unit	162.245.97	40%	64,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	800.000.00	16 Unit	6.291.00	15 Unit	138.850.00	15 Unit	92.869.30	40%	66,88	15 Unit	110.000.00	11 Unit	236.965.62	40%	29,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0!
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0!
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara										0,00						#DIV/0!
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	250.000.00	17 Unit	22.977.20	53 Unit	121.000.00	53 Unit	118.500.00	40%	97,93	53 Unit	82.000.00	11 Unit	233.297.20	40%	93,32
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	250.000.00	25 Unit	48.895.00	0 Unit	50.000.00	0 Unit	50.000.00		0,00	0 Unit		0 Unit	107.895.00		43,16
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara										0,00						#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	575.000.00	2 Unit	304.737.15	1 Unit	120.000.00	1 Unit	118.615.00		98,85	1 Unit	18.000.00	0 Unit	441.352.15		76,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /										0,00						#DIV/0!

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 (4 + 6 + 8)		10	
	Direhabilitasi																
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									0,00							#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yangDilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi									0,00							#DIV/0!
Jumlah 1										#DIV/0!		15.941.750.2			50.716.633.4 9		#DIV/0!
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										#DIV/0!		8.221.530.68			20.080.479.1 92		#DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Jumlah Desa Wisata yang ditata 2. Jumlah Destinasi Baru	5 Desa 3 Destinasi	15.333.755.0	3 Des 0 Destinasi		1 Des 0 Destinasi	3.686.441.87	1 Des 0 Destinasi		0,00		1 Des 0 Destinasi	8.221.530.68	0 Des 0 Destinasi	20.080.479.1 92		130,96
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang terkelola	1%	300.000.00	0,50%	269.643.32	0%		0%		0,00		0%		0%	269.643.32		89,88
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		0,00		0 Lokasi		0 Lokasi			#DIV/0!
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00		0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pengembangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Penantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	300.000.00	2 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		0,00		0 Lokasi		0 Lokasi			0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 dokumen		1 dokumen	269.643.32	0 dokumen		0 dokumen		0,00		0 dokumen		0 dokumen	269.643.32		#DIV/0!
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	30%	7.392.000.00	30%	1.690.220.29	30%	1.119.075.00	30%	1.705.502.75	152,40		30%	968.531.57	0%	4.401.148.1		59,54
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00		0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.200.000.00	2 dokumen	656.821.00	0 dokumen		0 dokumen	656.821.00	0,00		0 dokumen		0 dokumen	1.313.642.0		109,47
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Penantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		1 Lokasi	149.391.00	0 Lokasi		0 Lokasi	149.391.00	0,00		0 Lokasi		0 Lokasi	298.782.00		#DIV/0!
Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15 unit	5.342.000.00	2 unit	884.008.29	4 unit	969.075.00	4 unit	834.370.75	100%	86,10	4 unit	888.531.57	1 unit	2.642.032.1	10%	49,46
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil										0,00						#DIV/0!

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (ad Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 [4 + 6 + 8]		10	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan kawasan strategisPariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	700.000.00	0 Laporan		3 Laporan	150.000.00	3 Laporan	64.920.00	50%	43,28	3 Laporan	80.000.00	1 Laporan	146.692.00	30%	20,96
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	150.000.00	1 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi			0,00	0 Lokasi		0 Lokasi			0,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	1%	7.291.755.00	1%	5.113.330.35	1%	2.567.366.87	1%	2.329.853.44		90,75	1%	7.252.999.11	0%	15.340.394.4 5		210,38
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi			0,00	0 Destinasi		0 Destinasi			#DIV/0!
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.250.000.00	8 dokumen	756.673.30	1 dokumen	100.000.00	1 dokumen	98.512.25	100%	98,51	5 dokumen	650.000.00	1 dokumen	1.616.437.5 3	20%	129,32
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	1.200.000.00	1 Lokasi	98.932.90	0 Lokasi		0 Lokasi			0,00	0 Lokasi		0 Lokasi	98.932.90		8,24
Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15 Unit	3.406.900.00	12 Unit	3.979.690.45	8 Unit	1.846.395.87	8 Unit	1.769.324.57	100%	95,83	8 Unit	6.072.359.21	1 Unit	12.222.124.1 7	10%	358,75
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	886.420.00	4 Laporan	257.048.90	12 Laporan	211.284.00	12 Laporan	119.952.46		56,77	12 Laporan	420.952.90	3 Laporan	893.149.16		100,76
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	548.435.00	1 Lokasi	20.984.80	3 Lokasi	409.687.00	3 Lokasi	342.064.15		83,49	3 Lokasi	109.687.00	1 Lokasi	509.749.95		92,95
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	100%	350.000.00	40%	15.000.00	100%	66.000.00	100%	54.293.90		100%	0%		0%	69.293.90		19,80
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	18 Dokumen	350.000.00	11 Dokumen	15.000.00	10 Dokumen	66.000.00	10 Dokumen	54.293.90	100%	82,26	0 Dokumen		0 Dokumen	69.293.90		19,80

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 (4 + 6 + 8)		10	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			#DIV/0!
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	25%	8.452.200.000	160%	3.876.074.889	5%	3.665.970.000	5%	3.455.884.841		94,27	5%	3.479.440.000	0%	12.068.610.3		142,79
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	10 Kegiatan	8.452.200.000	4 Kegiatan	3.876.074.889	2 Kegiatan	3.665.970.000	2 Kegiatan	3.455.884.841	50%	94,27	2 Kegiatan	3.479.440.000	1 Kegiatan	12.068.610.3	50%	142,79
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	2.822.500.000	4 Dokumen	613.040.000	2 Dokumen	808.525.000	2 Dokumen	806.394.800	100%	99,74	2 Dokumen	274.500.000	1 Dokumen	1.808.434.8	25%	64,07
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Laporan	2.579.700.000	4 Laporan	2.418.329.929	4 Laporan	805.770.000	4 Laporan	675.538.000	100%	83,84	4 Laporan	1.950.940.000	2 Laporan	6.060.678.9	50%	234,94
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1.200.000.000	2 Dokumen	194.695.000	2 Dokumen	426.985.400	2 Dokumen	410.940.150	100%	96,24	2 Dokumen	204.000.000	1 Dokumen	849.535.15	10%	70,79
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	650.009.960	2 Dokumen	1.624.689.600	2 Dokumen	1.563.011.892	100%	96,20	2 Dokumen	950.000.000	1 Dokumen	3.249.961.4	10%	361,11
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	950.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	100.000.000		10,53
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	5%	1.000.000.000	0,50%	197.995.000	0%	30.000.000	0%			0,00	0%		0%	227.929.000		22,79
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah creative Hub (simpul ekonomi kreatif) yang terbentuk	2 Hub	450.000.000	1 Hub	197.995.000	0 Hub		0 Hub			0,00	0 Hub		0 Hub	197.995.000		44,00
Pengembangan dan Revitalisasi	Jumlah Kreatif Penyediaan Sarana	40 unit		31 unit		0 unit		0 unit			#DIV/0!	0 unit		0 unit			44,00

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 (4 + 6 + 8)		10	
Prasarana Kota Kreatif	dan Prasarana Kota		450.000.00		197.995.00										197.995.00		
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jejaring Komunitas Ekraf yang di bina	2 Komunita	550.000.00	0 Komunita		0 Komunita s	30.000.00	0 Komunita			0,00	0 Komunita s		0 Komunita	29.934.00		5,44
Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0 unit		0 unit		0 unit		0 unit			0,00	0 unit		0 unit			#DIV/0!
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan			0,00	0 laporan		0 laporan			#DIV/0!
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	550.000.00	0 Dokumen		1 Dokumen	30.000.00	1 Dokumen	29.934.00	100%	99,78	5 Dokumen		5 Dokumen	29.934.00		5,44
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	150.000.00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	25%	13.100.228.7	5%	984.127.30	5%	6.701.099.79	5%	6.305.939.41		94,10	5%	2.793.846.50	0%	11.497.464.4		87,77
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	3500 Orang	11.400.228.7	1500 Orang	984.127.30	500 Orang	6.681.099.79	500 Orang	6.296.139.41		94,24	500 Orang	2.483.846.50	0 Orang	11.129.693.4		97,63
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	500 orang	1.335.000.00	400 orang	348.750.00	200 orang	250.000.00	200 orang	197.033.50	50%	78,81	2200 orang	1.117.072.50	1050 orang	2.186.981.5	50%	163,82
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	500 Orang	1.000.000.00	150 Orang	99.849.80	800 Orang	1.400.699.00	800 Orang	1.489.485.60	59%	106,34	715 Orang	941.774.00	400 Orang	3.032.563.7	55%	303,26

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5		6		7		8		9 (4 + 6 + 8)		10	
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1000 Orang	2.204.508.13	1410 Orang	237.440.00	1300 Orang	1.404.509.73	1300 Orang	1.217.144.00		86,66	0 Orang		0 Orang	1.454.584.0		65,98
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	400 Orang	925.000.00	0 Orang		40 Orang	125.000.00	40 Orang	105.174.00	100%	84,14	0 Orang		0 Orang	105.174.00		11,37
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	10 Laporan	2.797.500.00	2 Laporan	149.999.90	3 Laporan	1.386.960.00	3 Laporan	1.344.528.31	100%	96,94	2 Laporan	425.000.00	1 Laporan	2.259.528.2	50%	80,77
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2700 Orang	3.138.220.66	200 Orang	148.087.60	2000 Orang	2.113.931.06	1900 Orang	1.942.774.00	90%	91,90	0 Orang		0 Orang	2.090.861.6		66,63
Monitoring dan Evaluasi Pengrmbangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan	510 Orang	1.700.000.00	20 Orang		20 Orang	20.000.00	20 Orang	9.800.00		49,00	0 Orang	310.000.00	0 Orang	367.771.00		21,63
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	510 Orang	450.000.00	0 Orang		20 Orang	10.000.00	20 Orang	9.800.00	100%	98,00	0 Orang		0 Orang	9.800.00		2,18
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	5 Laporan	210.000.00	0 Laporan		1 Laporan	10.000.00	0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			0,00
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	400 Orang	1.040.000.00	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0%	#DIV/0!	100 Orang	310.000.00	20 Orang	357.971.00	10%	34,42

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi program dan kinerja secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama pada aspek pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Beberapa program strategis telah berjalan dan memberikan dampak langsung terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Namun demikian, dari sisi realisasi keuangan, masih terdapat ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan penyerapan yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses perencanaan teknis, efisiensi pelaksanaan, serta penguatan koordinasi antar unit pelaksana.
2. Terdapat sejumlah faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi pencapaian target kinerja. Faktor pendorong antara lain adalah meningkatnya dukungan masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal, keterlibatan komunitas budaya dalam kegiatan dinas, serta dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang menguatkan posisi Dinas Kebudayaan sebagai pelaksana urusan kebudayaan secara mandiri. Di sisi lain, beberapa faktor penghambat juga perlu dicermati, seperti terbatasnya anggaran pada beberapa kegiatan prioritas, kurangnya tenaga fungsional budaya yang memadai, serta waktu transisi kelembagaan yang masih dalam tahap penyesuaian.

Evaluasi ini menjadi pelajaran penting dalam penyusunan Renja Tahun 2026 agar seluruh potensi dapat dimaksimalkan, hambatan dapat diminimalisasi, dan target kinerja dapat tercapai secara lebih efektif. Perlu upaya perbaikan baik dari sisi perencanaan, manajemen pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, agar setiap program tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi kemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung.

Untuk itu, strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi krusial, termasuk peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kinerja, serta perluasan kemitraan dengan komunitas budaya, akademisi, dan sektor swasta. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan ke depan, serta mempercepat terwujudnya pembangunan kebudayaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.2.
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Kinerja

NO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada staf untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai target.	Terbatasnya jumlah pegawai pada bidang-bidang teknis kebudayaan.

NO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
2	Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada staf untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai target.	Masih ada pegawai yang belum memiliki pemahaman menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi baru. Masih rendahnya kualitas laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dasar evaluasi kinerja.
3	Rapat koordinasi rutin antar bidang dan pimpinan dalam memantau capaian kerja serta memecahkan hambatan yang muncul di lapangan.	Jadwal pelaksanaan kegiatan terkadang tidak konsisten karena keterbatasan waktu dan SDM.
4	Besarnya potensi budaya lokal seperti kesenian tradisional, bahasa daerah, adat istiadat, dan cagar budaya yang dapat dikembangkan.	Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan aset budaya secara berkelanjutan.
5	Besarnya potensi budaya lokal seperti kesenian tradisional, bahasa daerah, adat istiadat, dan cagar budaya yang dapat dikembangkan.	Belum optimalnya kurasi dan dokumentasi terhadap ragam kekayaan budaya lokal di Kabupaten Bandung.bandung

Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis, meskipun terdapat pula kekuatan internal yang mendorong tercapainya target kinerja. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut strategis agar hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi dokumentasi semata, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyusun rencana tindak lanjut yang lebih adaptif dan responsif di masa mendatang.

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah-langkah perencanaan untuk mencapai target kinerja di tahun berikutnya. Evaluasi terhadap faktor pendorong dan penghambat yang telah terjadi selama tahun berjalan menjadi acuan strategis dalam penyesuaian kebijakan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan secara lebih tepat sasaran.
2. Kebijakan Kepala Perangkat Daerah agar perencanaan dan penganggaran sejalan dengan tujuan organisasi dilakukan melalui evaluasi rutin dan pemberian arahan kepada seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Langkah ini dimaksudkan untuk meminimalisir berbagai hambatan yang muncul di lapangan serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan kebudayaan daerah.

V.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026 disusun pada saat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan adanya keterkaitan yang kuat antara visi dan misi Kepala Daerah dengan tujuan serta sasaran strategis Dinas Kebudayaan, sehingga arah perencanaan menjadi lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dokumen ini tidak hanya sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan. Bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, Renja Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk mewujudkan tata kelola pembangunan kebudayaan yang sistematis, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik melalui program pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan mencakup berbagai aspek, antara lain: fasilitasi kegiatan kesenian dan warisan budaya, pelindungan terhadap aset budaya daerah, pembinaan komunitas budaya dan seniman lokal, serta penyediaan akses masyarakat terhadap ruang-ruang ekspresi budaya yang inklusif. Semua bentuk pelayanan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan, memperkuat identitas daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor budaya.



Gambar 2.1 Data Budaya di Kabupaten Bandung

Tabel 2.3. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-		51 Poin	52,25 Poin	52,50 Poin	n/a	56,19 Poin	-	52,50 Poin	n/a	Capaian kinerja indikator menunjukan kondisi yang semakin baik untuk memenuhi target akhir jangka menengah
2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	-		27%	27%	27%	n/a	55%	-	55%	n/a	

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal, terutama yang berkaitan dengan pendokumentasian warisan budaya, revitalisasi seni tradisi, dan pelindungan terhadap cagar budaya.

Hambatan lainnya adalah masih kurangnya sistem informasi yang mendukung pengelolaan data kebudayaan secara terintegrasi, sehingga menyulitkan proses perencanaan berbasis data. Tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan juga belum merata, disebabkan oleh minimnya akses informasi dan keterbatasan kapasitas komunitas budaya di wilayah tertentu. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor, khususnya dengan perangkat daerah lain maupun pihak eksternal, masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih sinergis dan berdampak luas.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam penyusunan Renja Tahun 2026, agar strategi dan kebijakan yang disusun dapat lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan, serta mampu mendorong akselerasi pembangunan kebudayaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

Tabel 2.4
Permasalahan Urusan Kebudayaan

URUSAN	MASALAH	KET
KEBUDAYAAN	Belum terbentuknya branding kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai identitas budaya daerah yang khas dan membedakan dari wilayah lain.	
	Belum tersedia peta jalan atau dokumen strategi kebudayaan daerah sebagai rujukan pengembangan kebijakan dan program lintas bidang kebudayaan.	
	Data dan informasi budaya, seperti cagar budaya, tradisi lisan, ekspresi seni, belum terdokumentasikan secara komprehensif dan terintegrasi.	
	Kurangnya tenaga fungsional budaya dan SDM pendukung yang kompeten dalam pengelolaan kebudayaan lokal.	
	Masih minimnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan lembaga pendidikan dalam pembinaan serta pelestarian seni dan budaya daerah.	
	Kurangnya dukungan anggaran terhadap kegiatan pelestarian budaya non-benda dan revitalisasi seni tradisi di tingkat lokal.	
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi, edukasi, dan penyebarluasan nilai-nilai budaya di masyarakat.	

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

3. Dampak Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap capaian Program

Sesuai dengan visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dan misi ke-1 yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak". Maka untuk tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

TUJUAN PEMBANGUNAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN PD	INDIKATTOR SASARAN
Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing	Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya sunda terhadap pembangunan daerah	Presentase Pemajuan Kebudayaan

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara bijak dan strategis. Tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program pelestarian budaya secara optimal. Selain itu, kurangnya data kebudayaan yang valid, serta rendahnya literasi budaya di kalangan generasi muda, turut menjadi kendala dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan.

Namun demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal, tumbuhnya komunitas seni dan budaya di berbagai wilayah, serta perkembangan teknologi digital yang dapat dijadikan sarana promosi dan edukasi budaya secara lebih luas. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah juga menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut, Dinas Kebudayaan diharapkan mampu memperluas cakupan pelayanan, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat identitas budaya Kabupaten Bandung di tengah arus perubahan zaman.

Tabel 2.6
Tantangan dan Peluang Kinerja

TANTANGAN	PELUANG
Kurangnya SDM fungsional kebudayaan yang kompeten dalam mendampingi kegiatan pelestarian seni, adat, dan budaya lokal.	Tersedianya peluang pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga seni budaya nasional.
Minimnya dokumentasi dan digitalisasi data objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung.	Dukungan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk digitalisasi data budaya secara masif dan mudah diakses oleh publik.
Belum optimalnya pelibatan komunitas budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan.	Semakin aktifnya komunitas budaya dan sanggar seni di berbagai kecamatan yang siap diajak kolaborasi dalam kegiatan kebudayaan.
Terbatasnya anggaran untuk pelestarian budaya non-benda dan revitalisasi tradisi lokal.	Regenerasi Pegawai Disbudpar untuk menutupi kekosongan jabatan Ketersediaan program bantuan pusat dan sponsor swasta untuk kegiatan kebudayaan yang dapat dimanfaatkan melalui proposal kerja sama.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelindungan cagar budaya dan warisan budaya takbenda.	Momentum pendidikan karakter di sekolah yang dapat diintegrasikan dengan edukasi nilai-nilai budaya lokal
Keterbatasan regulasi teknis daerah yang mendukung perlindungan dan pengembangan budaya lokal secara berkelanjutan.dasar pengambilan kebijakan pimpinan	Dukungan kebijakan pusat melalui UU Pemajuan Kebudayaan, dapat dijadikan dasar untuk penyusunan regulasi turunan di tingkat kabupaten.

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

5. Isu – isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menindaklanjuti isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diuraikan pada tabel sebelumnya, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merumuskan beberapa strategi utama yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan kebudayaan, antara lain:

a. Membangun kolaborasi dengan komunitas budaya, seniman lokal, akademisi, dan lembaga adat dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara partisipatif.
b. Menyusun peta jalan pengembangan kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai turunan dari dokumen pokok Pemajuan Kebudayaan dan Renstra Dinas.
c. Melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi objek pemajuan kebudayaan secara berkala untuk memperkuat basis data budaya yang akurat dan terintegrasi.

d. Mengusulkan kebutuhan ASN fungsional kebudayaan ke BKPSDM Kabupaten Bandung, terutama untuk tenaga kurator budaya, penyuluh budaya, dan fasilitator komunitas seni.
e. Melaksanakan digitalisasi arsip dan dokumentasi seni-budaya, termasuk karya maestro lokal, cagar budaya, dan ekspresi budaya tradisional.
f. Melakukan fasilitasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan HAKI budaya lokal ke Kemenkumham.
g. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan karakter di sekolah-sekolah melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan.
h. Mendorong pelaksanaan kegiatan seni dan budaya berbasis desa atau kelurahan, sebagai bagian dari penguatan identitas dan pelestarian budaya lokal.
i. Mengembangkan sistem informasi budaya berbasis digital untuk mendukung promosi, edukasi, dan akses publik terhadap kebudayaan Kabupaten Bandung.

V.4 Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kesesuaian antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan pembangunan kebudayaan yang telah dirumuskan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Proses review ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di bidang kebudayaan, serta sejalan dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Dinas Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, memiliki tantangan tersendiri dalam menyusun arah prioritas pembangunan kebudayaan yang lebih fokus dan terukur. Oleh karena itu, keselarasan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan riil lapangan menjadi penting untuk dipastikan sejak tahap awal perencanaan, agar usulan program dan kegiatan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah mengakomodasi kebutuhan dasar pembangunan kebudayaan, seperti pelestarian warisan budaya, penguatan kelembagaan kesenian, hingga fasilitasi ruang ekspresi budaya. Namun demikian, terdapat beberapa usulan spesifik dari Dinas Kebudayaan yang masih perlu diperkuat atau disesuaikan kembali agar lebih sinkron dengan kerangka regulasi dan keterjangkauan anggaran daerah. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KEBUDAYAAN			13.555.625.365,00		DINAS KEBUDAYAAN			13.555.625.365,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.555.625.365,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.555.625.365,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			13.555.625.365,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			13.555.625.365,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	61 Poin	8.848.390.340,00	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	61 Poin	9.456.273.715,00	-
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62 Poin				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62 Poin		
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	228.790.340,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	214.190.340,00	
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	101.990.340,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	120.790.340,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	66.400.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	66.400.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.004.000.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.004.000.000,00	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	5.000.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	5.000.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	27.000.000,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	16.000.000,00	
2.22.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	30.000.000,00		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00	
2.22.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	75.000.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00	
2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	25 Paket	25.000.000,00	Kab. Bandung,		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25.000.000,00	Kab. Bandung, Semua

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kelengkapan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	501.600.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	396.600.000,00	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	95.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	70.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					Penyediaan Bahan/Material				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	96.600.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	96.600.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	295.000.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	424.860.000,00	
2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	47.050.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	86.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	93.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan,

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kecamatan, Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa
2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	198.310.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.367.000.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.097.000.000,00	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	367.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	367.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.730.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	285.000.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	218.623.375,00	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	65.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung,		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	87.800.000,00	Kab. Bandung, Semua

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dipelihara			Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	65.823.375,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	35.000.000,00		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	35.000.000,00	
2.22.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	2.717.020.250,00		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	2.986.520.250,00	
	[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	5%	2.717.020.250,00	-	[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	25	2.986.520.250,00	-
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.407.020.250,00		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.551.520.250,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	1.407.020.250,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	1.551.520.250,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	-	-	1.310.000.000,00		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	-	-	1.435.000.000,00	

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota				
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	210.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	110.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1.050.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1.275.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				
		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	250.831.400,00		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	250.831.400,00	
	[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	39	250.831.400,00	-	[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	39	250.831.400,00	-
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	250.831.400,00		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	250.831.400,00	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan					Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses	75 Sertifikat	150.831.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	150.831.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Standarisasi			, Semua Kel/Desa					Kel/Desa
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	100.000.000,00		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	100.000.000,00	
	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sciarah]	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2	100.000.000,00	-	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sciarah]	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2	100.000.000,00	-
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah					Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	662.000.000,00		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	662.000.000,00	
	[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	24	662.000.000,00	-	[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	24	662.000.000,00	-
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya					Penetapan Cagar Budaya				
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Objek	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Objek	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	462.000.000,00		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	462.000.000,00	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya					Pelindungan Cagar Budaya				
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	107 Objek	462.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	107 Objek	462.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	100.000.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	100.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola	Persentase Kunjungan	0	100.000.000,00	-	[Meningkatnya tata kelola	Persentase Kunjungan	0	100.000.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	museum]	Wisatawan ke Museum				museum]	Wisatawan ke Museum			
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00	
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	JUMLAH			12.678.241.990,00					13.555.625.365,00	

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

V.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Telaahan Terhadap Usulan Musrenbang

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan daerah dilakukan melalui pengukuran indikator makro pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu indikator penting yang menjadi perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

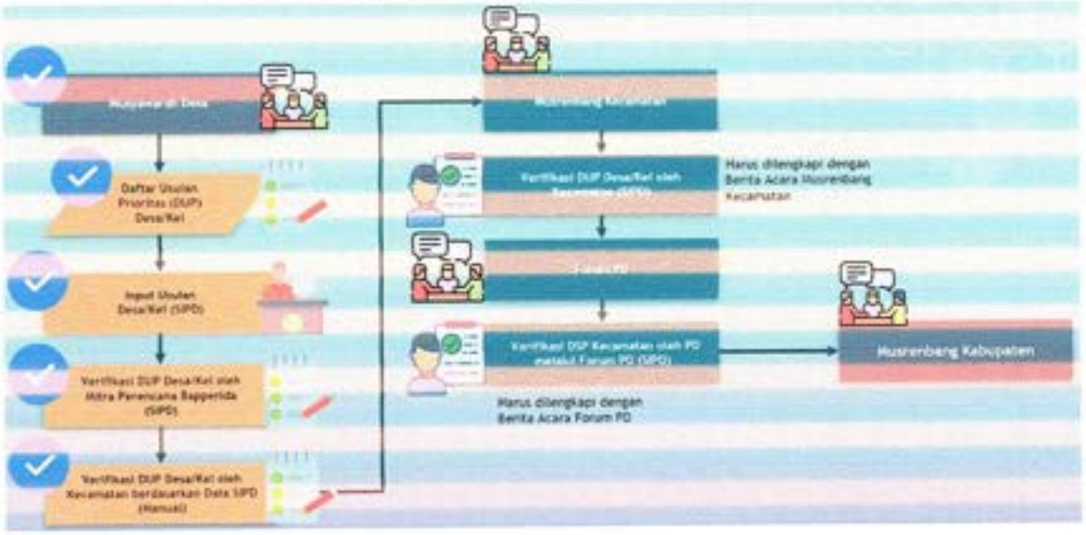
Dalam konteks rencana kerjanya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dituntut tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga mampu menggali potensi lokal, menjawab berbagai tantangan aktual, serta merumuskan kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kebudayaan. Kebutuhan untuk menyusun program kerja yang relevan, partisipatif, dan berdampak langsung menjadi semakin mendesak di era keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang tinggi.

Sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap usulan program dan kegiatan yang masuk melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan. Telaahan dilakukan untuk mengukur tingkat urgensi, relevansi, dan kesesuaian usulan dengan arah pembangunan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, RPJMD, dan RKPD.

Selain itu, proses telaahan juga dimaksudkan untuk menyaring dan memprioritaskan usulan masyarakat yang memiliki potensi memberikan dampak besar terhadap pelestarian budaya, pemberdayaan komunitas seni, pelindungan warisan budaya, dan peningkatan literasi budaya masyarakat. Kajian ini mencakup usulan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, komunitas seni dan budaya, lembaga adat, organisasi masyarakat, akademisi, hingga kelompok pemuda dan pelajar yang peduli terhadap isu-isu kebudayaan lokal.

Usulan-usulan tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi lapangan, dialog tematik, serta penelusuran data oleh tim teknis Dinas Kebudayaan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan riil di berbagai wilayah. Berikut ini disajikan alur usulan Musrenbang Kecamatan yang menjadi dasar dalam perumusan kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026:

Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal, Pemerintah Kabupaten Bandung secara konsisten melaksanakan proses perencanaan yang transparan dan akuntabel. Salah satu instrumen penting dalam memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi wadah partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dari berbagai lapisan.

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap aspirasi kultural masyarakat, Musrenbang memiliki peran strategis dalam memperkuat relevansi program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan sektor kebudayaan benar-benar bersumber dari akar persoalan dan potensi budaya lokal.

Melalui forum ini, berbagai masukan, usulan, dan gagasan dari komunitas budaya, tokoh masyarakat, lembaga adat, pelaku seni, serta organisasi kemasyarakatan dihimpun dan dikaji. Usulan tersebut kemudian diselaraskan dengan visi, misi, dan arah kebijakan strategis daerah serta Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, agar pelaksanaan program kebudayaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berdampak langsung terhadap pelestarian, pemberdayaan, dan pemajuan budaya lokal.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tahun perencanaan 2025 (untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2026), telah dihimpun sejumlah usulan program dan kegiatan yang diarahkan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Usulan-usulan tersebut telah melalui proses telaah teknis berdasarkan kriteria kelayakan, urgensi, dan kesesuaian dengan prioritas program dinas, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2026. Adapun daftar usulan hasil Musrenbang yang masuk kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA KECAMATAN	NAMA USULAN KEGIATAN	VOLUME
1	2	3	4	5	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan PariwisataPelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Banjaran	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
			Cangkuang	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
			Cicalengka	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
			Ciwidey	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
			Ibun	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
			Majalaya	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
			Nagreg	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
			Pacet	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
			Rancaekek	#MS Alat Kesenian Pencak Silat	1 set
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan PariwisataPelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Cilengkrang	#MS Alat Kesenian Reak / Benjang dan Pendukungnya	1 set
			Baleendah	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Baleendah	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Bojongsoang	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Cicalengka	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Cikancung	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Cikancung	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA KECAMATAN	NAMA USULAN KEGIATAN	VOLUME
1	2	3	4	5	7
			Cikancung	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Cikancung	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan da Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan PariwisataPelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Cileunyi	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Ciwidey	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Ibun	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Kertasari	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Kertasari	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Kertasari	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Majalaya	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Margaasih	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Nagreg	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Pacet	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Pacet	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Paseh	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set
			Paseh	#MS Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 set

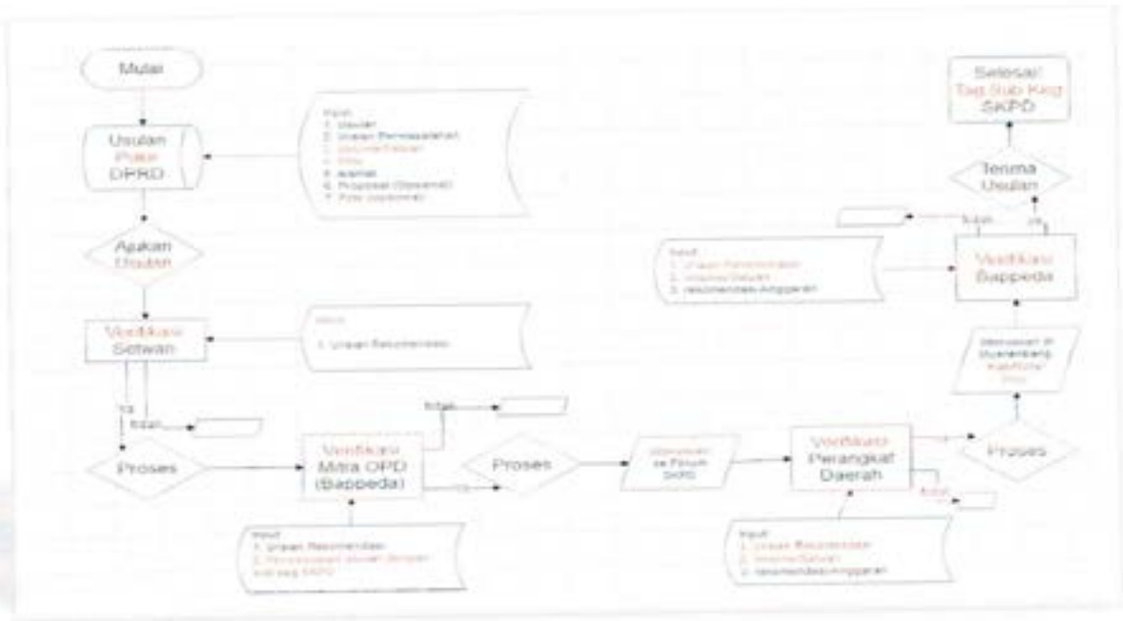
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA KECAMATAN	NAMA USULAN KEGIATAN	VOLUME
1	2	3	4	5	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Cangkuang	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Cilengkrang	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Cileunyi	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Cimaung	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Cimenyan	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Dayeuhkolot	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Katapang	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Kertasari	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Kutawaringin	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Pacet	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA KECAMATAN	NAMA USULAN KEGIATAN	VOLUME
1	2	3	4	5	7
			Pangalengan	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan
			Paseh	#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 kegiatan

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

2. Telahaan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD

DPRD memberikan saran dan masukan terhadap perumusan Renja 2025 berdasarkan hasil reses dan aspirasi dari masyarakat. Masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan dicantumkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Adapun alur usulan Pokir DPRD sebagai berikut :



Gambar 2.5 Alur Usulan Pokir DPRD

Rincian saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Usulan Program dan Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA KECAMATAN	NAMA USULAN KEGIATAN	VOLUME
1	2	3	4	5	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan PariwisataPelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Katapang	#PK Alat Kesenian Pencak Silat	1 Set
			Soreang	#PK Alat Kesenian Pencak Silat	1 Set
			Paseh	#PK Alat Kesenian Pencak Silat	1 Set
			Margahayu	#PK Alat Kesenian Pencak Silat	1 Set
			Paseh	#PK Alat Kesenian Pencak Silat	1 Set
			Majalaya	#PK Alat Kesenian Pencak Silat	1 Set
			Majalaya	#PK Alat Kesenian Gamelan (Kuningan)	1 Set
			Bojongsoang	#PK Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 Set
			Pangalengan	#PK Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 Set
			Pangalengan	#PK Alat Kesenian Hadroh / Marawis	1 Set
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Rancaekek	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Ciparay	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Pasirjambu	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA KECAMATAN	NAMA USULAN KEGIATAN	VOLUME
1	2	3	4	5	7
			Rancabali	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Ciwidey	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Soreang	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Kutawaringin	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Cangkuang	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Cileunyi	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Arjasari	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan
			Cilengkrang	#PK Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional dan Atraksi Budaya	1 Kegiatan

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

BAB VI
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

VI.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN 2025–2029 menempatkan sektor kebudayaan sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkepribadian, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam dokumen tersebut, pembangunan kebudayaan tidak hanya diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya, tetapi juga pada penguatan identitas nasional, peningkatan peran budaya dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta pelindungan terhadap warisan budaya, baik benda maupun takbenda.

Fokus utama arah kebijakan nasional di bidang kebudayaan meliputi: (1) pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal; (2) penguatan kelembagaan budaya termasuk revitalisasi taman budaya, museum, dan pusat seni; (3) pengarusutamaan budaya dalam pembangunan lintas sektor; serta (4) fasilitasi dan pendampingan komunitas budaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya. Pemerintah pusat juga mendorong penciptaan ekosistem budaya yang inklusif melalui kebijakan afirmatif terhadap komunitas adat dan kelompok rentan, serta penguatan kapasitas SDM kebudayaan.

Salah satu strategi utama dalam kebijakan nasional adalah pelaksanaan Strategi Pemajuan Kebudayaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Strategi ini mencakup penguatan data pokok kebudayaan melalui pemutakhiran secara nasional, fasilitasi penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), serta sinergi program antara pusat dan daerah untuk mendorong keberlanjutan kebudayaan sebagai sumber kekuatan pembangunan nasional. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK), revitalisasi bahasa daerah, dan pengembangan pendidikan budaya di semua jenjang pendidikan.

Transformasi digital juga menjadi prioritas nasional dalam kebijakan kebudayaan, yang mencakup digitalisasi arsip budaya, penyebaran konten budaya melalui platform daring, serta integrasi sistem informasi budaya nasional dan daerah. Selain itu, kebijakan nasional mendorong pelaksanaan diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan budaya global.

Dengan arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan dapat menyelaraskan program-programnya, baik dalam bentuk pelindungan warisan budaya,

Lebih lanjut, Dinas Kebudayaan diarahkan untuk membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan komunitas anak dalam mendesain program budaya yang mendidik, mencerahkan, serta memberdayakan. Kebijakan ini selaras dengan pendekatan pembangunan SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, toleran, dan cinta budaya lokal.

Dengan landasan tersebut, Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026 menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan misi dan arah kebijakan daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan yang konkret, berdampak, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung yang berbudaya dan berdaya saing

VI.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta menindaklanjuti arah kebijakan strategis nasional dan Provinsi Jawa Barat di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjabarkan visi dan misi daerah ke dalam agenda operasional kebudayaan yang sinkron dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Rencana kerja ini mengakomodasi berbagai isu strategis daerah, termasuk lemahnya dokumentasi dan pelindungan warisan budaya, rendahnya literasi budaya generasi muda, keterbatasan SDM kebudayaan, serta masih terbatasnya ruang ekspresi budaya di masyarakat. Selain itu, rencana kerja ini juga memanfaatkan potensi budaya lokal yang kaya, seperti seni tradisional, adat istiadat, bahasa daerah, dan ekspresi budaya takbenda lainnya yang berkembang di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung.

Berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 diarahkan untuk menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang penguatan karakter, pendidikan budaya, dan pemberdayaan komunitas seni dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan misi daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, berkarakter, serta berwawasan budaya lokal yang kuat. Dinas Kebudayaan juga menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai kekuatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan: Terwujudnya Berkebudayaan Maju

Tujuan ini mengarah pada upaya membangun kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung yang berbudaya, berkarakter, dan menjadikan kebudayaan sebagai landasan utama pembangunan daerah. Berkebudayaan maju berarti terciptanya ekosistem budaya yang hidup, produktif, dan inklusif, di mana nilai-nilai budaya Sunda

mampu tumbuh dan berkembang selaras dengan tantangan zaman. Kemajuan kebudayaan tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan kesenian yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa kuat budaya lokal menjadi identitas, sumber inspirasi, serta kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Upaya ini meliputi pelestarian warisan budaya, pengembangan ekspresi seni kontemporer yang berakar pada tradisi, serta pemanfaatan budaya sebagai sumber pembelajaran, penguatan karakter, dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Kebudayaan mendorong agar kebudayaan tidak sekadar menjadi ornamen seremoni, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari—dalam pendidikan, tata kelola komunitas, pengembangan desa budaya, hingga kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Dengan terwujudnya berkebudayaan maju, Kabupaten Bandung dapat menjadi daerah yang kuat dalam identitas, berdaya dalam inovasi, dan harmonis dalam keberagaman.

Sasaran: Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah

Sasaran ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai dan ekspresi budaya Sunda tidak hanya bertahan di tengah arus globalisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Ketahanan budaya mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan, melestarikan, dan mewariskan kebudayaan lokal dari generasi ke generasi. Sementara kontribusi budaya mengacu pada peran budaya dalam membentuk perilaku sosial yang positif, mendukung sektor ekonomi kreatif, serta memperkuat jati diri daerah di tengah dinamika pembangunan.

pencapaian sasaran ini mencakup meningkatnya dokumentasi dan pelindungan warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian tradisi lokal, hingga penguatan kelembagaan komunitas budaya di tingkat desa. Dengan sasaran ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengaktifkan budaya sebagai kekuatan pembangunan yang dinamis dan transformatif.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan DInas Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2026	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2026
Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan Makan, Minum	56,27 Poin	Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya sunda terhadap pembangunan daerah	Presentase Pemajuan Kebudayaan	45 %

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

Dalam proses perencanaan strategis pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja merupakan komponen penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara terarah dan terukur. Indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur kuantitatif semata, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan prioritas program, pengalokasian sumber daya, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah termasuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung wajib memiliki indikator yang selaras dengan arah kebijakan strategis daerah, relevan dengan tugas dan fungsinya, serta dapat dinilai secara objektif.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam memperkuat karakter daerah, membentuk identitas kultural masyarakat, serta mendorong budaya sebagai pilar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, perumusan indikator kinerja disusun dengan mempertimbangkan tantangan aktual di sektor kebudayaan, potensi lokal, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

Tujuan utama yang ditetapkan adalah "Terwujudnya Berkebudayaan Maju", yang mencerminkan cita-cita Kabupaten Bandung untuk membangun kehidupan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai budaya, berkarakter kuat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, digunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai indikator kinerja utama, dengan target capaian sebesar 56,27 poin pada tahun 2025.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan adalah "Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Sunda terhadap pembangunan daerah". Sasaran ini menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai kekuatan sosial dan ekonomi, sekaligus sebagai sumber pembentukan karakter masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah presentase pemajuan kebudayaan, dengan target capaian sebesar 45% pada tahun 2026.

Dengan landasan tujuan dan sasaran ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjalankan program dan kegiatan yang lebih terarah, berdampak nyata, serta mendorong transformasi kebudayaan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang diarahkan untuk memperkuat kontribusi kebudayaan dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter, beridentitas, dan berdaya saing. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan yang diselaraskan dengan tujuan strategis perangkat daerah serta kebutuhan riil masyarakat.

Proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara sistematis, berbasis pada analisis terhadap isu-isu strategis daerah, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta kajian terhadap kebijakan nasional dan provinsi di sektor kebudayaan. Pendekatan partisipatif dan responsif turut digunakan dalam menyusun setiap intervensi agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial budaya dan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bandung. Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan juga dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Program dan kegiatan yang disusun tidak hanya difokuskan pada pelestarian warisan budaya semata, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ruang-ruang pemberdayaan komunitas budaya, peningkatan literasi budaya generasi muda, serta perlindungan dan pemanfaatan budaya sebagai sumber kekuatan ekonomi lokal. Dengan demikian, rencana kerja ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi alat untuk mendorong transformasi kebudayaan yang berkelanjutan. Rincian keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
2.22.0.00.0.00.32.0000 - DINAS KEBUDAYAAN							
Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda	Terwujudnya Berkebudayaan Maju				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
		Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah			Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina		
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai AKIP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perencanaan Perangkat Daerah		
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	2.22.01.2.01 - Perencanaan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kepegawaian	Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan	2.22.01.2.06 - Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Presentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Presentase BMD dalam Kondisi Baik	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.22.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.22.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.22.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2.22.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.22.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2.22.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	2.22.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2.22.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Persentase Pemenuhan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.22.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.22.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.22.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.22.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Presentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2.22.01.2.08.0001 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	2.22.01.2.03.0004 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.22.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.22.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

VI.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memperoleh hasil yang terukur dan relevan dengan tugas serta fungsi perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk mencapai sasaran tertentu dan menjadi bagian dari solusi atas isu strategis yang dihadapi daerah. Dalam kerangka pembangunan kebudayaan, program-program yang disusun tidak hanya berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan budaya sebagai sumber daya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menyelenggarakan enam program prioritas. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan sektoral melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pelestarian cagar budaya dan sejarah lokal, pengembangan kesenian tradisional, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif dan partisipatif, di mana komunitas budaya, lembaga pendidikan, seniman lokal, serta masyarakat umum menjadi bagian aktif dari pelaksanaan program. Dengan pelibatan multipihak ini, diharapkan pembangunan kebudayaan tidak hanya berdampak pada pelestarian warisan budaya, tetapi juga mampu menciptakan ruang-ruang ekspresi budaya, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan kontribusi budaya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal Dinas Kebudayaan melalui penguatan sistem birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan manajemen risiko perangkat daerah. Fokus program ini adalah membangun organisasi yang adaptif, profesional, dan transparan guna mendukung pelaksanaan urusan kebudayaan secara lebih efektif dan efisien. Indikator utamanya adalah meningkatnya skor Indeks Reformasi Birokrasi dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah dari tahun ke tahun

2. Program Pengembangan Kebudayaan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Kegiatannya mencakup fasilitasi komunitas budaya, pelatihan dan workshop kesenian, penguatan desa budaya, hingga pelaksanaan event budaya berbasis lokal. Target program ini adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya dari 2% menjadi 3% di tahun 2026.

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini fokus pada pelestarian, revitalisasi, dan pengembangan kesenian tradisional Sunda. Bentuk kegiatannya mencakup inventarisasi kesenian, pembinaan kelompok seni tradisi, festival budaya, dan fasilitasi ruang pertunjukan rakyat. Output yang diharapkan adalah peningkatan prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan, dari 39% menjadi 44% pada tahun 2026.

4. Program Pembinaan Sejarah

Program ini fokus pada pelestarian, revitalisasi, dan pengembangan kesenian tradisional Sunda. Bentuk kegiatannya mencakup inventarisasi kesenian, pembinaan kelompok seni tradisi, festival budaya, dan fasilitasi ruang pertunjukan rakyat. Output yang diharapkan adalah peningkatan prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan, dari 39% menjadi 44% pada tahun 2026..

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dirancang untuk melindungi dan mengelola cagar budaya serta warisan budaya takbenda secara berkelanjutan. Kegiatan mencakup identifikasi dan pendataan, registrasi cagar budaya, penyusunan dokumen pelindungan, serta konservasi fisik dan non-fisik. Persentase pelestarian ditargetkan meningkat dari 24% menjadi 29% pada tahun 2026.

6. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya. Kegiatan utama mencakup revitalisasi museum daerah, peningkatan koleksi dan narasi sejarah, penyelenggaraan pameran tematik, serta promosi kunjungan museum. Dinas Kebudayaan menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan ke museum sebagai indikator efektivitas pengelolaan program ini.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026 merupakan turunan dari dokumen Renstra dan telah diselaraskan dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026. Seluruh kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisis isu strategis sektoral, serta masukan dari forum Musrenbang dan perangkat daerah. Kegiatan tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada aspek penguatan nilai, edukasi, partisipasi publik, dan pemberdayaan komunitas budaya.
Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KEBUDAYAAN				13.555.625.365,00						13.678.241.990,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.555.625.365,00						13.678.241.990,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				13.555.625.365,00						13.678.241.990,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	- 62 Poin - 61 Poin	9.456.273.715,00					-	9.848.390.340,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	81,50 Poin	214.190.340,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	248.790.340,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	120.790.340,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		121.990.340,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		1.800.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		1.800.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi		2.500.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								integratif, inovatif dan dinamis		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		40.000.000,00
	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		1.800.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	66.400.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		66.400.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	5.004.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	5.004.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	5.000.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		5.000.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		1.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		3.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100%	16.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	27.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		2.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan, Pengawasaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		25.000.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	25.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	30.000.000,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		30.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	145.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		25.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		120.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	396.600.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	501.600.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		70.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		95.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		70.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		20.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		50.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		10.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material									
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan		20.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		70.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	96.600.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		96.600.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	424.860.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	445.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	47.050.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		45.000.000,00
	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	86.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		100.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	93.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		100.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	198.310.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		200.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.097.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	3.097.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	367.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		367.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.730.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		2.730.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	93,75	218.623.375,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	-	315.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	65.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		65.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	87.800.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		100.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		50.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	65.823.375,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		100.000.000,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	35.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	35.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		35.000.000,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Program Pengembangan Kebudayaan	2%	2.986.520.250,00					-	2.717.020.250,00
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	6 Objek	1.551.520.250,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	1.407.020.250,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	1.551.520.250,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		1.407.020.250,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Semua Kel/Desa					
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan	83%	1.435.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	1.310.000.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	110.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		210.000.000,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1.275.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		1.050.000.000,00
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		50.000.000,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	39%	250.831.400,00					-	250.831.400,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau pelaku kesenian tradisional yang terdata dan tervalidasi	195 Orang	250.831.400,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	250.831.400,00
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		100.000.000,00
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan									
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	150.831.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		150.831.400,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2%	100.000.000,00					-	100.000.000,00
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang tercatat dan terdokumentasikan	56 Dokumen	100.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	100.000.000,00
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah									
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		100.000.000,00
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	24 %	662.000.000,00					-	662.000.000,00
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan	24%	200.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	200.000.000,00
	Penetapan Cagar Budaya									
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Objek	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		200.000.000,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang pelihara	105 Objek	462.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	462.000.000,00
	Pelindungan Cagar Budaya									
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	107 Objek	462.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		462.000.000,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	0%	100.000.000,00					-	100.000.000,00
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Presentase Pendirian Museum Daerah yang terbangun	25%	100.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal	-	100.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum									
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		50.000.000,00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Kebudayaan Lokal		50.000.000,00
	TOTAL			13.555.625.365,00	TOTAL					13.678.241.990,00

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

BAB VII
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

VII.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

KODE REKENING	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026			
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	DINAS KEBUDAYAAN			13.555.625.365,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.555.625.365,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			13.555.625.365,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	61 Poin	9.456.273.715,00
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62 Poin	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	214.190.340,00
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	120.790.340,00
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00

KODE REKENING	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026			
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00
2.22.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	66.400.000,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.004.000.000,00
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	5.000.000.000,00
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	16.000.000,00
2.22.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
2.22.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			

KODE REKENING	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026			
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.000.000,00
2.22.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00
2.22.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	25.000.000,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00
2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25.000.000,00
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	396.600.000,00
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000,00
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85.000.000,00
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00

KODE REKENING	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026			
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	96.600.000,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	424.860.000,00
2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	47.050.000,00
2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	86.000.000,00
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	93.500.000,00
2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	198.310.000,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.097.000.000,00
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	367.000.000,00
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.730.000.000,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	218.623.375,00
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

KODE REKENING	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026			
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	65.000.000,00
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	87.800.000,00
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	65.823.375,00
2.22.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	35.000.000,00
2.22.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	35.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	2.986.520.250,00
	[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2 5	2.986.520.250,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.551.520.250,00
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	1.551.520.250,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.435.000.000,00

KODE REKENING	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026			
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	110.000.000,00
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1.275.000.000,00
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	50.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	250.831.400,00
	[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	39	250.831.400,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	250.831.400,00
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100.000.000,00
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	150.831.400,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	100.000.000,00
	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi seiarah]	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2	100.000.000,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00

KODE REKENING	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026			
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	662.000.000,00
	[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	24	662.000.000,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Objek	200.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	462.000.000,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	107 Objek	462.000.000,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	100.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola museum]	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	0	100.000.000,00
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	50.000.000,00
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	50.000.000,00
J U M L A H				13.555.625.365,00

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

BAB VIII
PENUTUP

VIII.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas, nilai, dan ketahanan budaya daerah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dilakukan berdasarkan analisis terhadap kondisi aktual kebudayaan, potensi seni tradisi dan warisan budaya, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Seluruh program dan kegiatan yang dirancang merupakan hasil dari identifikasi isu strategis kebudayaan, kebutuhan riil masyarakat adat dan komunitas budaya, serta tantangan sektoral seperti minimnya regenerasi pelaku budaya, pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal, dan lemahnya ekosistem kelembagaan budaya. Penyusunan Renja ini juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor serta sinergi antarlevel pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

VIII.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diarahkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan disusun secara terukur, berbasis data, serta mengedepankan pendekatan berbasis hasil (result-based planning).

Pelaksanaan program kebudayaan juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kolaborasi dengan komunitas budaya, seniman, budayawan, lembaga adat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi pendekatan utama dalam membangun ekosistem kebudayaan yang dinamis dan berdaya saing.

Penguatan kelembagaan budaya, penyesuaian struktur organisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga teknis kebudayaan dan pengelola pusat kegiatan budaya, merupakan elemen kunci dalam mendukung implementasi program yang optimal. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dokumentasi budaya menjadi instrumen penting dalam memperluas akses, memperkuat promosi warisan budaya, serta mempercepat transformasi digital sektor kebudayaan.

VIII.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin konsistensi implementasi Renja tahun 2026, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung akan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut yang mencakup:

1. Penguatan koordinasi internal dan eksternal guna menyinergikan pelaksanaan program kebudayaan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga adat, komunitas budaya, akademisi, dan pemerintah desa;
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU) guna mengukur capaian output dan outcome secara objektif, khususnya dalam aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya;
3. Pengembangan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan program kebudayaan;
4. Pemetaan potensi dan peluang pendanaan alternatif dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, mitra swasta, CSR, dan lembaga filantropi budaya untuk mendukung pembiayaan kegiatan strategis;
5. Penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah agar pelaksanaan program kebudayaan tetap adaptif terhadap perubahan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pelaksanaan yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta kolaborasi multipihak yang sinergis, diharapkan pembangunan sektor kebudayaan Kabupaten Bandung mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan jati diri daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis budaya, serta ketahanan sosial yang berakar pada kearifan lokal.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjadikan tahun 2026 sebagai momentum penguatan ekosistem kebudayaan yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program-program strategis yang adaptif terhadap dinamika zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari hadirnya kebijakan kebudayaan yang progresif dan inklusif.

Ke depan, Dinas Kebudayaan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebudayaan melalui inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Bandung, cita-cita mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berdaya saing, serta bangga akan identitas dan warisan budayanya, akan semakin mendekati kenyataan.

Demikian dokumen ini kami susun, kami berharap dokumen renja pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026 ini dapat dijadikan bahan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Soreang, Juli 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd

IRVAN AHMAD

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA